



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 801/II/2014

I/FEBRUARI 2014



LAUNCHING

TV PARLEMEN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
BEKERJASAMA DENGAN
BERITA SATU, FIRST MEDIA, BIG TV

SELASA 28 JANUARI 2014



**Ketua DPR Resmikan
Kerjasama TV Parlemen
dengan Berita Satu, First Media dan Big TV**

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA FEBRUARI 2014

Minggu pertama Februari 2014 diawali dari kegiatan Rapat Paripurna tanggal 28 Januari 2014, yang beragendakan Pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Laporan Hasil Pembahasan Komisi VII terhadap Rancangan kebijakan energi nasional. Kegiatan DPR pada Sidang Tahunan Ke-22 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) juga disampaikan pada laporan AKD minggu ini.

Paripurna 28 Januari 2014

Paripurna telah menyetujui pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Keseluruhan keanggotaan Pansus sejumlah 30 anggota, terdiri dari Fraksi Demokrat 8 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, Fraksi PDI-Perjuangan 5 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi Gerindra 1 orang, dan Fraksi Hanura 1 orang.

Mengenai Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang disampaikan oleh Ketua Komisi VII Dr. Ir. Sutan Bhatogana MM, dikatakan bahwa: sesuai amanat UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, pasal 11, diatur bahwa Dewan Energi Nasional merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR-RI. Untuk itu, maka Komisi VII melakukan serangkaian pembahasan sebagaimana penugasan Bamus DPR pada 24 Juni 2013. Ketua Komisi VII mengatakan bahwa, energi merupakan faktor utama pendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk secara nasional, maka kebutuhan energi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Untuk itu, diperlukan pasokan energi, baik berasal dari produksi energi fosil dan non-fosil domestik, maupun melalui import energi fosil.

Sumberdaya energi fosil dan non-fosil nasional tidak tak terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan energi harus dilakukan secara hati-hati, agar dapat menjamin ketahanan ener-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



gi, antara lain melalui ketersediaan pasokan, baik untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini, maupun masa datang. Namun kenyataannya, pengelolaan sumberdaya energi belum dilaksanakan secara optimal, karena ekspor energi masih menjadi andalan pemasok devisa nasional, yang mengakibatkan kebutuhan energi dalam negeri, baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri, masih belum terpenuhi secara optimal.

Permasalahan lain yang dihadapi sektor energi antara lain, belum efisiennya penggunaan energi, belum tepat sasaran subsidi energi dan belum seluruh harga energi mencapai harga keekonomian, dan rendahnya minat investor untuk berinvestasi. Serta tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan rendahnya penguasaan teknologi energi.

Melihat masalah tersebut, Pemerintah harus melakukan pengelolaan energi yang tepat, baik pada sisi penyediaan *supply side management* maupun pada sisi pemanfaatan, *demand side management*, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Untuk itu maka kebijakan energi nasional yang akan ditetapkan Pemerintah, perlu diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan energi dan pembangunan berkelanjutan, melalui pemanfaatan sumberdaya energi fosil dan non fosil secara proporsional, efektif dan efisien.

Menurut UU tentang Energi Pasal 1 dan 2, menerangkan bahwa: kebijakan energi nasional, meliputi antara lain: [1] ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, [2] prioritas



pengembangan energi, [3] pemanfaatan sumberdaya energi nasional, dan [4] cadangan penyangga energi nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan energi 2013-2050 dijadikan masukan dalam memproyeksikan besarnya pasokan dengan mempertimbangkan berbagai strategi yang komprehensif.

Dalam pembahasan masalah ini, Komisi VII berkesempatan melakukan kunjungan luar negeri yaitu ke Norwegia, Selandia Baru, dan China, yang dilaksanakan pada April dan Mei 2013. Hasil kunjungan telah dijadikan referensi dan masukan, antara lain: [1] perlunya pengembangan energi baru dan terbarukan dalam menyokong kebutuhan energi masa depan; [2] pemberian subsidi energi masih diperlukan; [3] perlunya peningkatan anggaran riset untuk menghasilkan sumber energi baru yang ramah lingkungan; [4] kebijakan harga energi ditetapkan pemerintah. Kebijakan harga ini berbeda energi, tergantung sumber energi.

Akhirnya Komisi VII dalam Rapat tanggal 21 Januari 2014, yang dihadiri Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, dapat memberikan persetujuannya. Rapat Paripurna tanggal 28 Januari, juga memberikan persetujuan atas RPP tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan sedikit penyempurnaan sesuai saran dari fraksi, setelah dilakukan lobi.

Kegiatan Ketua DPR

Pada Selasa, 28 Januari 2014, Ketua DPR melakukan *launching* Kerjasama TV Parlemen DPR-RI dengan First Media. Dalam *launching* yang dihadiri oleh Pimpinan fraksi, Pimpinan AKD, Pejabat Kesenjangan DPR, Direktur Operasional sekaligus Pimpinan PT First Media, direktur Big TV, manager operasional Berita Satu TV, dan wartawan, Ketua DPR meresmikan kerjasama.

Sambutan Don Bosco Selamun selaku Direktur Operasional First Media, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas prakarsa DPR, untuk membangun kerjasama dengan First Media. Diharapkan dengan kerjasama ini, TV Parlemen dapat ikut

serta mengudara di dalam kegiatan penyebarluasan fungsi dan tugas DPR dengan lebih baik kepada masyarakat.

Ketua DPR menyampaikan, bahwa cita-cita kerjasama ini sebetulnya telah diinginkan, dan menjadi harapan sejak 2 tahun sebelumnya, agar kinerja Dewan dapat dipublikasikan kepada masyarakat secara utuh dalam membangun amanah konstitusionalnya. Disampaikan Ketua DPR bahwa, enam bulan sebelumnya, pada saat Ketua DPR bertemu dengan Peter Gontha (Berita Satu), telah disepakati untuk segera dilakukan kerjasama dengan dorongan dan sarana-prasarana yang dipersiapkan oleh pihak media Berita Satu. DPR-RI memberikan sambutan positif bagi kerjasama yang ditangani oleh Biro Kehumasan Kesenjangan DPR, dengan sebaik-baiknya. Dengan kerjasama ini, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang seimbang. Televisi sebagai salah satu media massa, memiliki fungsi strategis dalam menjembatani komunikasi antara DPR dan masyarakat. Televisi menjadi perantara dalam penyampaian aspirasi publik kepada para anggota dewan sebagai wakil rakyat. Televisi juga memberikan gambaran kepada masyarakat melalui pesan, aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang disampaikan kepada Dewan.

Sebelum Ketua meresmikan kerjasama ini, Sekjen DPR-RI melaporkan bentuk kerjasama yang telah dirintis dan segera akan dikembangkan melalui kerjasama ini. Diharapkan kerjasama ini mendapat dukungan dari Pimpinan Dewan, Pimpinan AKD, dan Pimpinan Fraksi serta anggota Dewan.

Diplomasi Parlemen

DPR-RI mengirim delegasi Pada Sidang Tahunan Ke-22 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di Puerto Vallarta, Meksiko 12-15 Januari 2014. Delegasi DPR-RI terdiri dari: Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM (Ketua Delegasi), H. Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua Delegasi); dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, Ida Ria Simamora, Muhammad Oheo Sinapoy, Drs. Helmy Fauzy, Dr. Muhammad Firdaus, dan Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, hadir dan berpartisipasi

Sidang tahunan tersebut merupakan forum penting bagi Indonesia untuk mengimplementasikan praktek diplomasi parlemen dan menggalang kerjasama dan dukungan dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam upaya menyelesaikan berbagai isu internasional. Indonesia sendiri adalah anggota *Executive Committee* di APFF sampai dengan tahun 2015. Sidang APFF mendiskusikan berbagai isu yang meliputi isu politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama regional. Isu yang paling mengemuka selama berlangsungnya Sidang APFF adalah yang bersinggungan dengan politik dan keamanan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan politik terbaru yang sedang dan masih terjadi di kawasan Asia Timur (potensi konflik di Semenanjung Korea) dan Timur Tengah (konflik bersenjata di Suriah dan perkembangan negosiasi perdamaian Israel-Palestina).

Memandang dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak, Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa walaupun situasi di Asia Pasifik secara keseluruhan masih tergolong stabil, ada keprihatinan terhadap konflik intra-regional yang belum terselesaikan. Ada beberapa permasalahan yang bisa mengganggu stabilitas regional, yaitu: 1) kawasan Asia Pasifik di kelilingi oleh pantai dan lautan yang rawan terhadap gangguan keamanan; 2) beberapa negara di kawasan masih terlibat konflik yang berkepanjangan; dan 3) mengenai situasi keamanan di Afghanistan pasca 2014. Tantangan untuk mempertahankan stabilitas kawasan juga dihadapi oleh ancaman riil berupa perlombaan kekuatan militer di Laut China Selatan.

Delegasi Indonesia juga secara konsisten terus menyuarakan pentingnya demokratisasi di kawasan Asia Pasifik. Demokrasi dapat memperkuat supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang stabil yang dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional. Delegasi Indonesia dalam kegiatan ini juga telah meraih kesuksesan tersendiri, yaitu mengolokan 5 Draft Resolusi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Secara khusus, Indonesia mengajukan isu mengenai aktifitas intelijen yang baru-baru ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Aktifitas intelijen yang tidak bertanggungjawab, dapat merusak hubungan kerjasama antar negara yang telah terbina selama ini. Isu lainnya adalah mengenai korupsi. APPF menyadari bahwa isu korupsi sudah menjadi isu internasional karena sifatnya yang lintas batas negara dan dapat melibatkan aktor/negara lain. Dengan demikian, kerjasama regional dalam memerangi korupsi mutlak diperlukan. Sebagai negara multi etnik berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong demokratisasi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga merupakan salah satu pelopor region-

alisme di kawasan Asia Tenggara yang perkembangannya kini sudah sangat signifikan. Dari sudut pandang geografis, Indonesia merupakan salah satu jalur utama perputaran perdagangan internasional yang dilalui oleh 3 jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Oleh karena itu, DPR RI juga dituntut untuk dapat memahami berbagai isu dan berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan internasional, yang salah satunya dapat diraih melalui forum kerjasama antar parlemen.

Dalam kesempatan itu, *President of the Committee of Foreign Affairs Mexican Senate*, Senator Teófilo Torres Corzo, meminta pertemuan dengan Delegasi Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Meksiko sangat serius dalam

keinginan mengembangkan hubungan antar 2 negara, bahkan mendesak agar beberapa MoU yang pending untuk segera direalisasikan. Selama tiga tahun terakhir, dialog dan komunikasi antara kedua negara berlangsung intensif. Indonesia dan Meksiko memiliki komitmen untuk mempererat kerjasama bilateral. Sebagai sesama negara anggota G20, Meksiko merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Tengah dan Selatan. Dalam berbagai isu, Indonesia dan Meksiko juga banyak memiliki kesepahaman. DPR RI dalam kesempatan ini juga telah memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.**

Ketua DPR Resmikan Kerjasama TV Parlemen dengan Berita Satu, First Media dan Big TV



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Anggota Ferdiansyah, Sekjen DPR Winantuningtyastiti serta Direktur Operasional First Media Don Bosco Selamun meresmikan kerjasama TV Parlemen dengan First Media, Berita Satu dan Big TV.

Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan terima kasih kepada First Media yang bersedia melakukan kerjasama dengan DPR menyiarkan kegiatan-kegiatan DPR. Dia berharap berita DPR yang muncul ke permukaan jangan yang negatif saja. “Saya bersyukur sebab hari ini telah bisa terkabul impian saya dengan di *launchingnya* kerja sama TV Parlemen dan tiga stasiun tv

tersebut,” katanya saat meresmikan kerja sama penyiaran tv di Gedung DPR, Selasa (28/1).

Dengan demikian, lanjut Ketua DPR, melalui kerja sama ini masyarakat akan memperoleh informasi yang seimbang. “Kami Pimpinan DPR maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya bisa menyampaikan apa yang diker-

jakan DPR, apa hasilnya dan apa yang harus diketahui oleh masyarakat,” ungkap Marzuki.

Di sisi lain, masyarakat juga harus tahu apa hak-hak yang mereka dapatkan terkait dengan UU yang dihasilkan DPR. Jangan sampai masyarakat tidak paham dan tidak tersentuh oleh kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah

dan DPR karena ketidaktahuan. Misalnya terkait dengan UU Desa, UU Perlindungan Petani dan UU Pendidikan Tinggi maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Melalui siaran televisi tersebut, lanjut Marzuki, masyarakat akan mengetahui hak-haknya seperti dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), juga bantuan lain seperti subsidi pupuk, bibit dan kepentingan masyarakat lainnya. “Harapan saya, ini bisa berlanjut terus. Ini bagian dari kerja keras saya selama ini mencari media yang mau kerja sama dengan DPR, hari ini bisa diwujudkan. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami,” tambah dia.

Diungkapkan pula, dengan adanya chanel TV Parlemen di First Media dan Big TV merupakan penyeimbang berita supaya masyarakat tahu bahwa DPR betul-betul bekerja. “Kita ini bekerja, tidak semuanya mengabaikan tugas tetapi justru telah melaksanakan tugas dengan baik,” katanya lagi.

Sementara itu Direktur Operasional First Media Don Bosco Selamun mengatakan, kerjasama dengan TV Parlemen berlangsung selama setahun dan kemungkinan terbuka untuk diperpanjang lagi. Kenapa bisa gratis, karena hubungan antara First Media dan TV Parlemen sudah lama, sementara penyiaran TV Parlemen terbatas padahal banyak aktivitas DPR yang perlu diked-

tahui oleh publik. Karena itu pihaknya tergerak untuk membantu, meskipun untuk infrastruktur telah mengeluarkan biaya. “Bisa gratis karena sumbangsih saja. Banyak berita DPR out of contact, kami membantu menyiarkan kegiatan DPR secara utuh,” jelas Selamun.

Hadir dalam acara ini anggota Komisi X Ferdiansyah, Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan para pejabat Setjen DPR, diwarnai kesenian gambang kromong lengkap dengan petasnya. Acara lebih meriah dengan tampilnya komedian Mucle selaku pembawa acara dengan lawakan segarnya. (mp) foto:odjie/parle/ry.

RUU Perdagangan Lindungi Kepentingan Nasional

RUU Perdagangan segera disahkan DPR RI setelah dibahas selama dua kali masa sidang. Inilah undang-undang yang kelak akan melindungi kepentingan perdagangan nasional. Tidak sekedar menjadi payung hukum, RUU Perdagangan ini juga dinilai antiliberalisme.

Demikian mengemuka dalam konferensi pers Pimpinan Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Press Room DPR, Rabu, (29/1). Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, menegaskan, yang paling strategis dari RUU ini adalah pengaturan perlindungan komoditas penting dan pokok yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. Dengan begitu, tak ada lagi kelangkaan dan harga yang melejit atas komoditas penting dan pokok tersebut.

Komoditas penting dan pokok tersebut, misalnya, komoditas pangan, pupuk, semen, dan lain-lain yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Untuk itu, kata Airlangga, Kemendag harus punya data primer yang valid untuk memantau komoditas penting dan pokok tersebut. Selanjutnya, di tangan Mendag, komoditas penting itu ditentukan sesuai kebutuhan nasional.



Pimpinan Komisi VI DPR dan Mendag. Gita Wirjawan menggelar jumpa pers.

Airlangga menjelaskan, wacana merumuskan RUU Perdagangan sebenarnya sudah lama dilakukan, bahkan mencapai 30 tahun. Wacananya sudah dilakukn sejak Mendag dijabat Arifin Seregar di tahun 1980-an. RUU ini bila sudah disahkan berarti akan menggantikan produk hukum Belanda, yaitu UU Penyaluran Perusahaan 1934 yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Bedrijfsreglementerings Ordonnatie* 1934.

Bisa dikatakan RUU ini akan menjadi tonggak sejarah baru yang mengatur dan menjamin kepastian terhadap kegiatan perdagangan Indonesia. RUU

Perdagangan ini tidak saja menggantikan banyak produk UU lama yang bersinggungan dengan urusan perdagangan, tapi juga melengkapi produk UU lainnya yang terkait, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Keparbehan, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan lain-lain.

Satu hal yang juga tidak kalah pentingnya, RUU ini mengatur secara detail dan tegas soal perjanjian perdagangan internasional. Dalam RUU ini, semua bentuk perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah dengan negara lain, harus dilaporkan dan disetujui DPR. (mh) Foto: Ry/Parle.



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoejana.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoejana mengatakan, Pemerintah selama ini tidak memiliki *roadmap blue*

RPP Kebijakan Energi Nasional Maksimalkan Pasokan Energi di Indonesia

print kebijakan energi nasional. Karena itu, lahirnya RPP tentang Kebijakan Energi Nasional diharapkan dapat memaksimalkan jaminan pasokan energi nasional kedepannya.

“Pemerintah kita tidak punya *roadmap blue print* kebijakan energi nasional seharusnya memang ada kebijakan energi 20-30 tahun kedepan,” ujar Sutan disela-sela Rapat Paripurna baru-baru ini.

Menurutnya, pemerintah harus cerdas dengan menggunakan bahan-bahan non fosil sebagai energi alternatif. “Di Amerika Serikat mereka memiliki cadangan besar namun tidak dieksplorasi oleh mereka,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemerintah kedepan harus memiliki kebijakan energi nasional siapapun Presidennya nanti acuannya ada didalam RPP tentang Kebijakan Energi Nasional tersebut. (si) Foto:HR/Parle/Odje*

Tahun 2020 Pilkada Serentak di Seluruh Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kelak akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Itu berarti, Pilkada serentak ini menyusul pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang juga digelar serentak pada 2019.

Demikian dijelaskan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja (F-PAN) sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/1). “Pemerintah dan semua fraksi sudah menyepakati Pilkada serentak nasional 2020,” ungkap Hakam. Pelaksanaan Pilkada serentak itu semakin mengefisienkan waktu dan anggaran.

Menurut Hakam, untuk menuju Pilkada serentak secara nasional, tentu harus bertahap. Pada tahun 2015 ada gelombang pertama Pilkada



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja.

serentak untuk beberapa daerah. Lalu, untuk sisa daerah-daerah lainnya digelar pada gelombang kedua tahun 2018. Pilkada serentak ini, tidak hanya pemilihan gubernur, tapi juga wali kota dan bupati.

“Kita sudah membuat simulasi. Setelah dipertimbangkan, langkah awal perintisan Pilkada serentak di Sumatera Barat, Aceh, dan beberapa daerah di Jawa, ternyata lebih bagus. Semua SDM bisa terkonsolidasi, dari penggalangan masyarakat dan biaya jauh lebih efisien. Jadi, banyak hal yang positif yang menguntungkan dan praktis. Imbasnya juga kecil, kecuali ada gangguan keamanan, papar Hakam.

Ditanya soal kemungkinan menggabungkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada ke depan? Hakam menjawab, wacana itu belum terpikir. Semuanya masih berkonsentrasi menyukseskan Pemilu serentak, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Namun demikian, semua kemungkinan itu tetap terbuka. (mh) foto:ry/parle.

DPR Setujui Nama-Nama Anggota Pansus RUU MD3

Rapat Paripurna DPR yang dihadiri 281 anggota dari 550 anggota menyetujui nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“Bila tidak ada keberatan terhadap anggota yang diusulkan dari masing-masing fraksi, bisa kita sepakati untuk

disetujui,” kata Wakil Ketua DPR Muh. Sohibul Iman saat memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/1).

“Setuju.....,” teriak anggota dewan secara serempak dan palu diketuk.

Berikut daftar nama-nama anggota Pansus MD3, dari

Fraksi PD terdiri dari Agung Santoso, Edi Ramli Sitanggang, Saan Mustopa, Yahya Sacawiria, Ida Riyanti, Dalimi Abdullah DT. Indokayo, Venna Melinda dan Benny K harma.

Perwakilan dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, Taufiq Hidayat, Nurul Arifin, Azhar Romli, Nudirman Munir, Poempida Hidayatulloh. Fraksi PDIP, Arif Wibowo, Bambang Wuryanto, Achmad Basarah, Eva Kusuma Sundari, Abidin Pikri.

Selanjutnya dari Fraksi PKS, terdiri dari Fahri Hamzah, TB. Soemandjaja, dan Abdul Hakim. Fraksi PAN mengirimkan wakilnya yaitu Totok Daryanto dan A. Riski Sadiq. Ahmad Yani dan Muhammad Arwani Thomafi mewakili F-PPP.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pansus MD3 ini diisi oleh Muh. Hanif Dhakiri serta Muh. Unais Ali Hisyam. Fraksi Gerindra oleh Rindoko Dahono Wingit dan terakhir Fraksi Partai Hanura Saleh Husin.

Rapat Paripurna kali ini mengagendakan dua agenda yang akan dilaporkan yaitu mengenai laporan komisi VII mengenai hasil pembahasan RPP tentang kebijakan energi nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan agenda pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). (nt)/foto:andri/parle/ry.

Pemerintah Harus Hati-hati Soal PGN

Wacana upaya akuisisi yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau yang lebih dikenal dengan PGN masih terus berlanjut. Tentunya, akuisisi ini memiliki dampak, baik negatif maupun positif.

Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyatakan pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan akuisisi PGN ini. Pasalnya, Pertamina dan PGN adalah perusahaan BUMN yang berbeda.

“Saya rasa pemerintah harus hati-hati, karena Pertamina itu kan perusahaan negara, 100 persen milik negara. Sementara, sebagian saham PGN sudah dimiliki oleh publik. Kalau terkait akuisisi itu, harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diikuti oleh seluruh pemegang saham,” kata Arif saat ditemui sebelum Rapat Paripurna, Selasa (28/01), di Gedung Nusantara II.

Politisi PDI Perjuangan ini khawatir, rencana akuisisi ini malah membawa dampak negatif. Padahal, selama ini kinerja PGN dan pergerakan sahamnya cukup bagus.

“Tapi, ketika ada rencana Kementerian BUMN untuk akuisisi tersebut, sangat mempengaruhi pergerakan saham, bahkan sampai terdepresiasi hingga level 20 persen penurunannya,” tambah Arif.

Dalam pandangan Arif, pada wacana akuisisi ini ada unsur

ketidakhati-hatian pemerintah. Menurutnya jika memang belum ada kepastian, hal ini jangan disampaikan ke publik.

“Saya heran sama BUMN kok menyampaikan hal itu. Jangan *grusa-grusu* lah. Kalau memang ada masalah di transmisi gas atau ada penyatuan proses bisnis dari hulu ke hilir, harus dilakukan dengan hati-hati, karena dilakukan terhadap perusahaan yang berbeda karakter dan statuta hukum di *public*,” jelas Arif.

Politisi berkacamata ini menambahkan, sebagai Komisi yang membidangi keuangan negara, Komisi XI belum menerima pemberitahuan dari kementerian manapun, baik dari Kemenkeu ataupun BUMN tentang rencana akuisisi itu.

“Sampai saat ini, Komisi XI belum mendapatkan *business plan* dari rencana penggabungan itu, manfaatnya apa, bagi aktifitas bisnis ke depannya. Kita belum dapat data soal itu. Kan tidak mungkin kita bicara soal rumor atau berita dari media. Komisi XI belum menerima surat maupun data,” tambah Arif.

Secara pribadi, Arif menyatakan menolak rencana akuisisi ini. Karena belum ada urgensinya PGN bergabung dengan Pertamina.

“Kalau saya pribadi menolak, karena tidak ada urgensinya melakukan akuisisi ini. Sama-sama perusahaan negara ini. Yang penting diperkuat saja bisnisnya, kalau PGN ya yang diperkuat transmisi gasnya,” tutup Arif. (sf) Foto:ry/parle.



Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta.

Komisi IV Bereaksi Keras Masuknya Beras Impor Ilegal

Adanya kabar beras impor ilegal masuk ke Indonesia mendapatkan reaksi keras dari Komisi IV DPR RI. Kesimpang siuran ini harus dimintakan klarifikasi kepada Pemerintah. “Jika benar beras yang diimpor itu beras medium dilakukan oleh swasta, itu sangat menyalahi aturan UU yang ada. Hukumannya harus semakin berat,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo (F-PG).

Apabila beras tersebut ilegal menurutnya harus disita negara. “Disita oleh negara, bagikan pada rakyat, supaya ada efek jera” tegas Firman, saat Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, Senin (27/1), di Gedung Parlemen, Senayan.

Menurut Firman Subagyo, hal ini juga terkait dengan lemahnya ketentuan undang-undang. Bilamana barang masuk ke pabeaan yang surat-suratnya belum lengkap diberikesempatan selama 3 bulan untuk melengkapinya.

Awalnya masuk tidak punya surat-surat tapi akhirnya bisa melengkapinya dokumen. “Otoritas kepabeaan terlalu luar biasa. Jadi barang ilegalpun akhirnya bisa menjadi legal,” ungkap Firman.

Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya kelemahan di kepabeaan. Ini juga terjadi pada produk pangan lainnya seperti daging, kedelai dan bawang yang bisa masuk tanpa surat lengkap, yang kemudian bisa dilengkapi surat. “Atas kasus ini maka perlu segera merevisi UU Kepabeaan,” tandas Firman.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Menteri Pertanian Suswono, menjelaskan pada tingkat Kementerian Perekonomian tidak ada izin impor beras medium. “Kalaupun ada pasti ditugaskan kepada Bulog, tidak mungkin diserahkan ke swasta,” jelasnya.

Menurut Suswono, jajaran Dirjen Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. “Yang dikeluarkan rekomendasi P2HP hanya beras khusus atau beras tertentu seperti

menir, dan ketan. Itupun ada syaratnya,” paparnya.

Terkait kasus masuknya beras dari Vietnam ini, Menteri Pertanian minta kepada Dirjen P2HP untuk mencari tahu informasi yang lengkap.

Kepala Badan Karantina Bainun Harpini mengatakan pihaknya tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan dokumen. “Pemeriksaan SPI adalah tugas aparat bea cukai,” katanya.

Tapi ditambahkan Bainun Harpini, dalam kasus beras, Kementerian Perdagangan juga sudah menunjuk surveyor untuk melakukan pengecekan di negara asal termasuk jenis beras terkait kesesuaian izin.

“Tidak ada alasan sekarang impor beras karena Bulog cukup kuat dengan stok diatas 2 juta ton,” tambah Suswono. (as), foto : eka hindra/parle.

Sempat Lobi, RPP Kebijakan Energi Nasional disetujui



Anggota DPR Yassonna H. Laoly.

Sempat dilakukan lobi kurang lebih sejam, akhirnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional disetujui oleh Paripurna DPR RI. Sebelumnya, anggota DPR Yassonna H. Laoly (F-PDIP) sempat mempertanyakan mengenai RPP tentang Kebijakan Energi Nasional. Pasalnya, Yassonna menilai RPP merupakan domain pemerintah selaku kebijakan.

Kemudian dijawab Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, dia mengatakan, RPP tentang Kebijakan Energi Nasional memang diamanatkan oleh UU tentang energi. “Kebijakan energi nasional itu ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR RI, karena itu diputuskan dan diagendakan untuk diparipurnakan,” ujarnya.



lain halnya dengan Anggota DPR Nurdiman Munir (F-PG), dia mempertanyakan isi dari pasal 20 ayat 1 terkait pembelian energi. “Pasal 20 ayat 1 dalam RPP harus dirubah karena masyarakat tidak tahu besaran pembelian maupun penjualan energi nasional,” tandasnya.

Menurutnya, persoalan tersebut memperlihatkan tidak adanya keterbukaan terkait pembelian energi yang ditegaskan dalam pasal 10 RPP ini. “Masyarakat perlu tahu. Saya minta dalam PP ini supaya dimasukkan dalam hal pembelian

energi,” tegasnya saat Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di Gedung Nusantara II, Selasa, (28/1).

Sementara Dolfie (F-PDIP) meminta ada kejelasan dalam pasal 20 ayat 1 RPP. Rapat akhirnya diskor untuk melakukan lobi fraksi yang menyepakati perubahan pasal 20 ayat 1 RPP menjadi “Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian dan berkeadilan”. (si) foto : hr/parle/naefurodjie*

Baleg Nilai Bahasa Isyarat Tidak Bisa Dipatenkan

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Didi Irawadi Syamsudin menilai bahwa bahasa isyarat merupakan hak paten bagi penyandang disabilitas dalam berkomunikasi tidak bisa dipatenkan atau didaftarkan sebagai hak milik seseorang.

“Saya pikir itu tidak bisa sembarangan orang, kebetulan saya praktisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jadi karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan umum itu tidak bisa dipatenkan karena sudah domain publik,” tegas Didi saat Rapat Baleg dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dipimpin Wakil Ketua Baleg, Ahmad Dimiyati Natakusumah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/1)

Ditegaskan Didi, jika ada pihak-pihak yang mencoba mematenkan atau mendaftarkan sebagai hak mereka, kami dari Fraksi Demokrat siap paling depan membela penyandang disabilitas.

Karena hak ini sudah ada sejak lama, kata Didi. mulai dari adanya huruf braille. Bukan saja merupakan publik domain tapi juga tidak bisa didaftarkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk bisnis.

“Jika kita bicara mengenai paten, bicara merek itu adalah dalam konteks bisnis. Sementara ini adalah sesuatu hal untuk menolong orang, membantu kehidupan sosial seseorang, jadi tidak boleh didaftarkan,” tegasnya.

“Jadi kepada para penyandang disabilitas, jangan khawatir kami akan di depan untuk membela,” tambahnya.

Kemudian terkait Perubahan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Didi berharap seluruh fraksi yang ada di Baleg mendukung secepatnya untuk bisa dituntaskan dalam periode ini bisa selesai.

Pasalnya, penyandang disabilitas harus punya hak yang equal dengan pihak lain. Bukan karena belas kasihan. Disi sepakat, setiap warga negara di negeri ini sama equal di dalam kehidupannya, di bidang hukum, di bidang sosial dan lain sebagainya.



Wakil Ketua Baleg Ahmad Dimiyati Natakusumah menerima Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.

Dalam rapat yang membahas perubahan UU tentang Penyandang Cacat, Didi menegaskan, bahwa jauh sebelum Persatuan Penyandang Disabilitas hadir di sini pihaknya juga melihat didalam kehidupan nyata di lapangan di negeri ini kerap penyandang disabilitas ini kurang mendapatkan hak yang memadai, mulai dari hal-hal sepele, misalnya, tempat parkir, dan tempat-tempat lainnya seperti toilet ini tidak bisa digunakan oleh penyandang disabilitas.

Jika ada pelanggaran, dirinya sepakat didalam Undang-Undang ini, barang siapa orang melanggar ada sanksinya. Karena walau bagaimanapun ini jumlah yang besar dan bukan karena kepentingan pemilu. Jauh sebelum pemilu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya.

“Saya pikir hari ini adalah hal yang menarik, mudah-mudahan menjadi sejarah bagi kita, bagi kalangan disabilitas untuk ke depan mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” imbuh Didi. (sc), foto : hr/parle/naefurodjie*

Solusi Impor Selalu Merugikan

Di tengah sulitnya distribusi pangan karena bencana alam, pemerintah selalu membuka kran impor untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Kebijakan itu selalu merugikan negara. Dan pemerintah tak punya solusi permanen untuk mengatasi semua itu.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan) sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (28/1). Menyusul banjir di kawasan Pantura yang menyebabkan distribusi pangan ikut tersendat, saat ini harga-harga komoditi pangan mulai merangkak naik. Beras, cabai, sayur mayur, dan buah-buahan melejit.

“Transportasi dari Surabaya ke Jakarta yang biasanya 1 hari, sekarang jadi 4-5 hari. Jadi, berat sekali. Tentu dampaknya kesulitan suplay. Suplay terbatas, karena produksi petani juga rusak,” ungkap Hendrawan. Karena produk lokal tak sampai ke tangan konsumen, akhirnya produk impor yang menggantikannya. Solusi yang



Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno.

bersifat sementara ini selalu diambil pemerintah, tanpa pernah berpikir solusi jangka panjang.

“Solusi sementara selalu membuka kran impor. Ini solusi sementara yang sebenarnya merugikan, karena dengan dibuka kran impor, itu artinya ruang pasar yang semula diisi produk-produk dalam negeri sekarang diisi produk-produk impor. Beras dari Vietnam tiba-tiba muncul. Itu, kan, aneh,”

tutur Hendrawan.

Hingga saat ini, belum nampak solusi jangka panjang yang dikeluarkan pemerintah menyangkut kesulitan distribusi atau kelangkaan pangan di Tanah Air. Akar masalah tak pernah tersentuh. “Solusi harus permanen yang mengatasi akar masalahnya. Kalau infrastrukturnya yang jadi masalah, ya harus segera dibenahi secara permanen. Jalan Pantura itu harus menjadi jalan yang luar biasa kuatnya. Jangan dijadikan proyek abadi. Aspalnya tipis, sehingga tiap tahun ada anggaran APBN masuk.”

Menurut Hendrawan, mentalitas proyek masih mewarnai pengambil kebijakan. Tujuannya, agar selalu dapat keuntungan dari anggaran infrastruktur. Akibatnya, tidak saja infrastruktur yang rusak, distribusi pangan pun ikut kacau. “Harus dikikis habis mentalitas koruptif. Ini bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana financial, dan yang lebih berat lagi bencana moral,” keluh Hendrawan. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII Sesalkan Tindakan Asusila Awak Trans Jakarta



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah.

sebelum memasuki ruang sidang Paripurna, Selasa (28/1).

“Trans Jakarta merupakan *public transportation* yang menjadi andalan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Dan disaat kepercayaan masyarakat terhadap adanya *public transportation* yang aman dan nyaman mulai

Ketua Komisi VIII sesalkan pencabulan yang dilakukan oleh Petugas atau awak Trans Jakarta. Apalagi disaat kepercayaan masyarakat terhadap adanya *public transportation* yang aman dan nyaman mulai tumbuh. Hal tersebut diungkapkan Ida Fauziyah sesaat

tumbuh, malah muncul peristiwa tersebut. Ini tentu sangat menyedihkan, apalagi hal itu dilakukan oleh petugas atau awak Trans Jakarta yang notabene diharapkan menjadi “pelindung” para penumpang, terutama kaum hawa,” jelas Ketua Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

Oleh karena itu dilanjutkan Ida, agar menimbulkan efek jera dan kejadian serupa tidak terjadi lagi, maka ia berharap agar para pelaku dihukum setimpal sesuai undang-undang yang berlaku. Bahkan proses pidana diharapkan dapat berjalan secara transparan dan adil. Terutama keadilan terhadap korban pencabulan itu sendiri. Jika belakangan diketahui para pelaku tidak ditahan atau dibebaskan oleh pihak kepolisian, menurut Ida maka itu tentu perlu penjelasan tersendiri dari Polda Metro Jaya.

“Tentu pihak kepolisian memiliki alasan tersendiri untuk tidak menahan para pelaku. Namun saya berharap agar proses hukum terus dijalankan. Bagaimana hukum juga bisa memberi rasa keadilan dan aman kepada masyarakat, terutama kaum perempuan, baik dari tindak kejahatan maupun kekerasan seksual. Sehingga kejadian serupa tidak terulang

lagi,” tambahnya.

Sementara itu kepada Wartawan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Rikhwanto beberapa waktu lalu mengatakan, alasan penyidik tidak menahan tersangka karena ancaman hukuman Pasal 281 KUHP di bawah 5 tahun penjara. Selain itu penyidik Polres Jakarta Pusat juga punya alasan subjektifitas. Keempat tersangka tidak ditahan karena adanya penjamin dari pihak keluarga.

Peristiwa tidak senonoh itu dilakukan oleh awak Trans

Jakarta di Halte Harmoni pada Selasa (21/1) lalu. Saat itu korban naik bus TransJ jurusan Pulogadung-Harmoni dari Halte Cempaka Putih. Setelah di dalam bus, korban tiba-tiba pingsan. Korban kemudian diturunkan di Halte Harmoni oleh petugas bus TransJ yang ada di dalam bus tersebut. Di Halte Harmoni, korban kemudian diajak oleh para tersangka dengan alasan hendak diobati. Di dalam ruang genset, korban dipijat oleh para tersangka. Namun selanjutnya, para tersangka meraba-raba korban dan terjadinya tindakan asusila tersebut. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman.

Menyusul bencana banjir yang mengakibatkan tersendatnya distribusi pangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus bereaksi cepat mencari solusi. Jangan sampai masyarakat terus dikorbankan dengan kelangkaan bahan pokok ini.

Kemendag Harus Bereaksi Cepat di Tengah Bencana

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman mengatakan hal tersebut sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/1). “Jadi sebetulnya Kemendag harus *action*. Memang, infrastruktur rusak. Banjir di mana-mana. Produk pangan tenggelam karena banjir. Kemendag dan pertanian harus segera duduk bersama mengantisipasi ini,” himbau Azam.

Seperti diketahui distribusi pangan dari Jawa Timur ke Jakarta terhenti, karena transportasi terganggu. Menurut Azam, Kemendag tidak saja berkoordinasi dengan Kementan, tapi juga perlu mengajak Kemenhub untuk saling membantu menyelesaikan masalah agar distribusi pangan lancar.

Sebenarnya, dalam RUU Perdagangan yang sedang dibahas Komisi VI, kondisi *force majeure* karena bencana

juga sudah diatur. Nanti Kemendag diberi kewenangan oleh UU untuk mengambil langkah cepat demi menyelamatkan distribusi pangan nasional. RUU Perdagangan tersebut, kini hampir selesai. Tinggal menunggu sinkronisasi saja.

“Dalam menghadapi hal seperti ini sudah kita atur dalam RUU Perdagangan. Sekarang sudah selesai, tinggal masuk ke tim sinkronisasi,” jelas Azam. Dalam kondisi darurat bencana seperti sekarang, lanjut Azam, impor pangan mungkin tak terelakkan, karena produk pangan petani juga rusak telan banjir, ditambah infrastruktur jalan hancur oleh genangan air. Maka tak ada jalan lain untuk sementara mengimpor, sambil memperbaiki kerusakan yang ada. (mh), foto : hr/parle/naefurodje*

Kajari Pariaman Dilaporkan ke Komisi III

Komisi III DPR RI menerima laporan David Lukman, suami Nilma Sari mantan Direktur Akademi Perawat Kab. Padang Pariaman, Sumbar yang terjerat kasus korupsi di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Aparat Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat yang memeriksa kasus ini dinilai telah bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penegakan hukum.

“Istri saya baru diperiksa setelah 40 hari ditahan, kemudian laporan BPKP telah terjadi kerugian negara baru diterima 3 bulan kemudian. Apakah demikian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman, tahan dulu baru cari kesalahannya,” katanya dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/14).



Wakil Ketua Komisi III DPR AI Muzammil Yusuf menerima laporan David Lukman.

Dalam tahanan Jaksa istrinya pernah mengalami sakit, karena tidak sanggup pihak RS Pariaman kemudian merujuknya ke RSUP M. Jamil Padang. “Kajari malah meminta untuk membuat surat pernyataan di atas materai untuk menanggung biaya rumah sakit istri saya termasuk uang makan petugas kejaksaan yang mengawal selama dirawat,” paparnya.

Ia juga menyebut selama proses pemeriksaan, istrinya sering dibentak dan diancam oleh oknum jaksa sehingga mengakibatkan istrinya mengalami depresi sehingga mendapat

perawatan Dokter Spesialis Kejiwaan. Tindakan aparat kejaksaan di Pariaman ini telah dilaporkannya kepada Jaksa Agung namun sejauh ini belum ada tindak lanjutnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir menilai salah satu penyebab tidak profesionalnya jaksa dalam melaksanakan tugas adalah karena dibebani target kasus oleh Kejaksaan Agung. “Saya pernah sampaikan ke Jaksa Agung, jangan diberikan target ke Kajari dalam kasus-kasus yang ada nanti bisa mengundang terjadinya kriminalisasi. Kasus

seperti ini bukan kasus pertama yang disampaikan ke Komisi III,” tandasnya.

Pimpinan sidang Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf mengatakan akan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan kepada Jaksa Agung yang merupakan mitra kerja komisi bidang hukum ini. “Tekanan yang dilakukan oknum jaksa ini tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di KUHP dan KUHP. Kita akan sampaikan ini kepada Jaksa Agung,” pungkas dia. (iky), foto :hr/parle/andry*

Ketua Komisi IX Khawatir Adanya Gerakan Menolak BPJS

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning khawatir terhadap adanya upaya yang menggerakkan masyarakat agar menolak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/1)

“Ada yang memainkan agar orang-orang menolak BPJS. Sebagaimana saya dengar sudah ada gerakan-gerakan kepala-kepala daerah sudah berkoordinasi untuk menolak BPJS. Mudah-mudahan ada kejelasan dari Kementerian Kesehatan,” ujar Ribka.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 banyak menghadapi hambatan dan kendala. Menurut Ribka, dari posko-posko yang dibuka di daerah-daerah pemilihan (dapil-red) anggota Komisi IX menerima pengaduan yang sangat luar biasa dari masyarakat.

Lebih lanjut, Ribka mempertanyakan program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan statement Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu tentang capaian MDGs pada 2015.

Oleh karena hal tersebut, kata Ribka, Rapat Kerja Komisi IX hari ini adalah untuk meminta penjelasan Menteri Kesehatan tentang implementasi JKN oleh BPJS, pelaksanaan Program Jamkesmas, Program Jampersal, Program BOK dan Capaian MDGs.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengucapkan terima kasih adanya pos-pos pengaduan yang dibuka oleh anggota Komisi IX di dapilnya masing-masing.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan sendiri telah membuka *mailing list* dan *teleconference* ke semua Kabupaten/Kota untuk memantau pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

“Kementerian Kesehatan secara terus menerus melakukan sosialisasi secara terpadu yaitu antara jajaran BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan di daerah maupun organisasi profesi. Saya tahu di beberapa daerah ada anggota dewan yang turut sosialisasi. Untuk itu Kemenkes menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih,” papar Nafsiah.

Nafsiah mengaku, bahwa dirinya juga tahu jika ada anggota dewan yang tidak puas dan mengatakan BPJS Kesehatan gagal. “Percayalah kami terus menerus melakukan perbaikan, apakah itu perbaikan peraturan, perbaikan panduan-panduan pelaksanaan dan sebagainya,” ujarnya.

Khusus mengenai Jampersal, dijelaskan Nafsiah bahwa Jampersal tidak dihapuskan. Jampersal hanya dihapus-

kan dari anggaran Kementerian Kesehatan sama seperti Jamkesmas. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah *double budget*. Tapi *benefitnya* sudah masuk kedalam JKN yang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, dijelaskan Nafsiah bahwa benar jika untuk yang tidak mampu sudah otomatis ditanggung, karena masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan yang tidak mampu tidak bayar tapi mendapat seluruh *benefit* dari Jampersal melalui Jamkesmas. Begitu juga dengan eks Askes PNS, TNI/Polri dan anggota Jamsostek otomatis jadi peserta BPJS.

Sehingga kalau istri atau dia sendiri sebagai pegawai wanita hamil dia mendapat seluruh *benefit* Jampersal.

“Yang masih harus membayar adalah umum. Tetapi dengan membayar Rp 25.500,-/bulan/orang, maka dia dapat menjadi peserta dan mendapat seluruh *benefit* Jampersal,” papar Nafsiah.

Ditegaskan Nafsiah, bahwa Kemenkes telah melakukan evaluasi untuk Jampersal. Menurutnya, dengan adanya Jampersal saja tidak cukup untuk menurunkan angka kematian anak dan ibu bahkan angka kematian ibu meningkat.

“Ini yang harus kita perbaiki dengan strategi yang lain seperti peningkatan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana dan sebagainya. Jadi kesalahpahaman bahwa Jampersal itu dihapuskan saya harap hilang,” ujar Nafsiah.

(sc), foto : hr/parle/naefurodje*

Dana Saksi Bukan Untuk Parpol

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dalam keterangannya, Selasa (28/1), mengatakan bahwa tidak benar kalau dana saksi adalah dana untuk Parpol, melainkan dana penyelenggaraan pemilu untuk para saksi peserta pemilu di TPS yang tujuannya agar mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan.

“Pengalokasian dana saksi Parpol peserta Pemilu bukan pengalokasian dana untuk Parpol, tetapi dana penyelenggaraan Pemilu untuk dapat menghadirkan para saksi-saksi di TPS dari semua Parpol peserta Pemilu, sehingga mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dapat terawasi secara maksimal dimana masing-masing saksi Parpol akan mengawasi satu sama lainnya dalam hal terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak,” jelas Agun.

la menambahkan, adapun pengalokasian dana saksi-saksi tersebut, karena dasar hukumnya adalah UU Pemilu Legislatif yang fokus menjalankan fungsi pengawasan, maka penempatan alokasi anggarannya di Bawaslu.

“Dan mekanisme pencairannya bu-



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar.

kan sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Parpol peserta pemilu namun pencairannya secara langsung kepada saksi di TPS setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara yang masing-masing saksi harus menyerahkan surat penugasan dari masing-masing Parpol yang bersangkutan,” terang Agun.

Lebih lanjut ia menjelaskan, keberadaan saksi Parpol peserta Pemilu dan saksi calon anggota DPD telah diatur dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pengaturan saksi di TPS, jelasnya, didasarkan atas kepentingan terwujudnya mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung secara tertib dan menjamin untuk tidak terjadinya praktik kecurangan sehingga azas pemilu luber, jurdil dapat dilaksanakan.

“Keberadaan saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan Pemilu, yang tentunya semua aktifitas penyelenggaraan Pemilu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.

Berkenaan dengan saksi calon anggota DPD karena jumlahnya dan teknis penyelenggaraannya yang sulit ditempuh, maka tugas pengawasan atas pemungutan dan penghitungan suara calon anggota DPD, diawasi oleh mitra pengawas pemilu.

“Mitra pengawas pemilu berjumlah 2 orang yang pengaturannya berada didalam kendali Bawaslu yang dimungkinkan adanya pengawasan didalam pagar kotak TPS dan satunya berada diluar pagar kotak TPS yang tugas-tugasnya akan diatur oleh Bawaslu,” papar Agun yang juga Politisi Partai Golkar. (nt), foto : rizka/parle/hr.

Baleg DPR Janji Perjuangkan RUU Disabilitas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Dimiyati Natakusumah janji akan memperjuangkan RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (RUU Disabilitas). Hal tersebut disampaikan Dimiyati saat menerima masukan penyusunan draft RUU Disabilitas dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Ruang Rapat

Baleg Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/1)

“Baleg akan memperjuangkan keinginan bapak dan ibu sekalian, bahwa RUU ini merupakan inisiatif DPR dan dilaksanakan oleh Baleg, sebagaimana pasal 28 A konstitusi kita tentang Hak Azasi Manusia. Setiap orang berhak untuk



Pimpinan Baleg DPR foto bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” jelas Dimiyati.

Dimiyati mengharapkan, PPDi ikut memonitor perjalanan RUU perubahan. Dijelaskan Dimiyati, jika nanti menjadi pergantian UU akan tergantung kepada substansi yang diubah/diganti. Misalnya pergantian di atas 50% maka itu pergan-

tion, tapi jika masih di bawah 50% berarti itu perubahan.

Menurutnya, draft RUU dari PPDi akan dipelajari Baleg. Namun, kata Dimiyati, intinya DPR merupakan wakil PPDi akan memperjuangkan sekuat tenaga.

Walaupun, jelas politisi Fraksi PPP ini, terkadang pembeding atau mitra yaitu pemerintah problematikanya terhadap keuangan dan terhadap permasalahan lainnya. Jika konsensusnya terjadi antara pemerintah dan DPR, maka apa yang PPDi harapkan bisa terwujud dengan baik.

“Monitor terus dan jangan bosan-bosan menanyakan kepada Tenaga Ahli Baleg dan Sekretariat Baleg. Silakan kapan saja bapak dan ibu bertanya, apalagi jika ada email saling email, bagaimana draft yang diharapkan supaya hasilnya sesuai dengan harapan kita semua,” pungkasnya.

(sc)/foto:iw/parle/odjie.

Pemerintah Diminta Cukupi Kekurangan Subsidi Pupuk



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menangani kekurangan kuantum pupuk bersubsidi tahun 2014 dengan melakukan realokasi anggaran pupuk organik dan mendorong kemampuan petani untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri. “Apabila masih terjadi kekurangan kuantum pupuk bersubsidi akan diusulkan melalui APBN-P 2014,” kata Wakil Ketua

Komisi IV Herman Khaeron (F-PD).

Demikian salah satu kesimpulan Rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas rencana pelaksanaan subsidi pupuk Tahun 2014, Senin (27/1), di Gedung Parlemen, Senayan.

Kementerian Pertanian menyatakan

alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2014 hanya mencukupi kebutuhan sampai bulan November. Untuk itu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan pihaknya telah mengusulkan ke Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan agar volume pupuk bersubsidi tahun 2014 sebesar 9,55 juta ton.

Berdasarkan rencana itu, anggaran subsidi yang diperlukan Rp.22,18 triliun. Sementara itu, anggaran subsidi pupuk 2014 tersedia Rp.21,18 triliun. “Apabila dibandingkan dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi 2014, alokasi itu hanya mampu mencukupi sampai November 2014,” katanya.

Suswono menyatakan ada dua skenario yang diusulkan untuk perhitungan kebutuhan tambahan anggaran, yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) naik dan Harga Eceran Tertinggi (HET) tetap, atau HPP dan HET keduanya naik. Jika HPP yang naik dan HPP tetap, perlu tambahan anggaran subsidi Rp.9,06 triliun. Namun apabila asumsi HPP dan HET dinaikkan, kebutuhan anggaran Rp.2,25 triliun. (as) foto:iwan armanias/parle/rizka.

Wakil Bicara

“Politik Bukan Sesuatu yang Haram untuk Alumni PTAI”

“Saat ini Indonesia membutuhkan mahasiswa PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) yang siap pakai, baik dalam dunia kerja, profesional, bidang usaha maupun politik tanah air. Oleh karena itu, hendaknya PTAI juga membekali para mahasiswanya dengan keahlian-keahlian khusus atau *life skill*, termasuk *skill* berpolitik. Bagi Alumnus PTAI itu sendiri Politik bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Justru dengan adanya lulusan PTAI yang notabene sudah lebih memahami hal keagamaan, ke depannya politik Indonesia akan lebih banyak diwarnai dengan politikus yang lebih berakhlak tinggi, selain tentunya juga yang mumpuni di bidangnya,” ungkap Humaedi.

Humaedi : Anggota Komisi VIII (F-PC)



Refrizal : Anggota BURT DPR (F-PKS)

Jadi, pemerintah termasuk Pemda DKI Jakarta jangan hanya ngomong lagi sekarang, tetapi segera berbuat untuk menanggulangi banjir. Sebaliknya, normalisasi Sungai Ciliwung dan ide rumah susun segera dilaksanakan, apalagi dana yang dialokasikan triliunan rupiah.

“Ada atau Tidak Ada Dana saksi Pemilu, Tidak Masalah”

“Saya menyambut positif wacana adanya dana saksi dalam Pemilu 2014 yang dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Daripada suara rakyat dibelokkan di jalan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu hanya karena materi. Dengan begitu dapat meminimalisir kecurangan pada Pemilu 2014 mendatang. Tetapi kalau ada yang menolak, ya sah-sah saja, itu hak mereka. Dengan penggunaan sebagian APBN untuk pembayaran saksi, bukan berarti negara mengabaikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Ada dana-dana lain dalam APBN yang memang dikhususkan dan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Tetapi, bagi kami, ada atau tidak ada dana saksi dari APBN itu tidak jadi masalah,” papar Saleh Husein.

Saleh Husein : Anggota Komisi V DPR RI (F-Hanura)



Koordinasi Menjadi Barang Langka di Indonesia

Anggota Komisi VIII Amran menilai, koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, masih langka. Akibatnya, bantuan kepada korban bencana menjadi terhambat.

“Kalau kita lihat kinerja BNPB dalam hal tanggap darurat, kita lihat itu ada satu hal yang menjadi barang langka di kita, bahkan menjadi mahal, yaitu koordinasi antar instansi yang ada di daerah dalam tanggap bencana. Kita lihat ini agak lamban. Mungkin *leader* koordinasi ini tidak tanggap dalam melakukan koordinasi darurat,” kata Amran di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senin (27/01).

Politisi PAN ini juga menilai, hal ini akan menambah persoalan jika ada Provinsi yang tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga Pemerintah Daerahnya mesti turun langsung.

“Jika ada bencana di daerah, berarti



Anggota Komisi VIII DPR Amran.

itu menjadi wilayah kerja BPBD. Yang menjadi persoalan, ada beberapa daerah di Indonesia yang belum memiliki BPBD. Siapa yang melakukan koordinasi jika tak ada BPBD? Tentunya Pemerintah Daerah,” tambah Amran.

la memberi contoh Pemda yang dapat melakukan koordinasi tanggap bencana. Sehingga, tak perlu menunggu instansi yang memiliki tupoksi menangani bencana.

“Sebagian daerah saya rasa sudah ada yang melaksanakan koordinasi

darurat. Contohnya di Palopo, Sulawesi Selatan, jika ada bencana, maka Walikota langsung turun, sehingga kemudian seluruh instansi yang berkepentingan terjun langsung ke lokasi bencana. Saya rasa ini perlu menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain. Jadi, jangan menunggu instansi yang memiliki tugas berkaitan dengan bencana,” harap Amran.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan ini menambahkan, hal yang menjadi kendala dalam menangani bencana adalah masalah anggaran, karena pada saat penanganan bencana masih ada kebingungan mau mengambil dana darimana.

“Sehingga, mungkin koordinasi menjadi terhambat karena bingung ini anggaran siapa yang akan dipakai. Seharusnya Pemda itu harus memiliki inisiatif. Untuk keluar dari persoalan ini, Pemda harus menyiapkan dana siap pakai atau dana cadangan untuk penanganan bencana,” harap Amran.

(sf), foto: hr/parle/naefurodjie*

Marzuki : Dubes Ekuador Banyak Bantu Indonesia

Duta Besar (Dubes) Republik Ekuador untuk Indonesia Eduardo Calderon segera mengakhiri masa tugasnya di Indonesia. Dia salah satu Dubes asing yang sangat membantu Indonesia, terutama dalam hubungan bilateral Indonesia-Ekuador.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menerima kunjungan kehormatan Dubes Ekuador di ruang kerjanya, Senin (27/1). “Beliau sangat proaktif membangun hubungan Indonesia dan Ekuador,” nilai Marzuki. Hubungan DPR dengan Parlemen Ekuador juga sangat baik, berkat peran strategis seorang Calderon.

Sosoknya sangat ramah dan mau dekat dengan banyak orang di Indone-



Ketua DPR RI Marzuki Alie berdialog dengan Dubes Ekuador.

sia. Itulah, kata Marzuki, kunci sukses Calderon dalam bertugas sebagai Dubes di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Ketua DPR, Calderon secara resmi menyampaikan bahwa ia segera mengakhiri masa tugasnya pada bulan Januari 2014 ini. Dia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ketua DPR, karena sudah diterima dengan baik selama bertugas menjadi Dubes.

Bahkan, Marzuki dalam kesempatan pertemuan tersebut, mendoakan Calderon agar menjadi menteri di

Ekuador selepas bertugas menjadi Dubes di Indonesia. Bagi Marzuki, Calderon punya kesan mendalam. “Beliau begitu ramah, sederhana, dan enak diajak bicara.” Kelak, pengganti Calderon juga akan seperti itu karakternya. Karakter Calderon mirip orang Indonesia. “Kalau karakternya seperti itu, mudah membangun hubungan,” kata Marzuki lebih lanjut.

Marzuki mencontohkan, saat sidang IPU, Calderon sangat berperan menyampaikan permintaan DPR kepada Parlemen Ekuador agar mendukung

Indonesia menjadi pemimpin IPU. Dan akhirnya DPR, memang, betul-betul terpilih sebagai Presiden IPU. Sementara bicara hubungan bilateral Indonesia dan Ekuador, terutama bidang politik, selama ini tidak menemukan masalah apapun. Hubungan itu sangat baik.

Di akhir pertemuan, Calderon sempat memberikan cinderamata berupa topi sebagai kenang-kenangan bagi Ketua DPR. Topi itu langsung dikenakan Marzuki. Sungguh pertemuan yang sangat berkesan. (mh) foto:rizka/parle.

DPR Desak Program Sertifikasi Lulusan SMK Bisa Segera Dilaksanakan

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pada tahun 2015, Indonesia akan memasuki pasar bebas di tingkat Asean, dimana akan mengalir arus uang, barang dan juga arus teknologi dan tenaga kerja. Pertumbuhan industri dirgantara sekarang maju pesat dan imbasnya frekuensi penerbangan di Indonesia meningkat sangat tajam. Konsekuensinya akan memerlukan jumlah sumber daya manusia yang besar pula.

Dalam kaitan ini, kata Marzuki, kita telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan, tetapi tidak ada lembaga yang mensertifikasi tamatan SMK itu memiliki keahlian dalam hal kedirgantaraan. “Ini berbahaya, sebab bisa-bisa nanti tenaga kerja kedirgantaraan Indonesia akan diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari Asean, akhirnya tenaga kerja tamatan SMK kita akan kalah bersaing,” katanya se usai memimpin Rapat Konsultasi dengan Menhub EE Mangindaan, Menristek Gusti Mohamad Hatta dan wakil dari Kemendikbud, di Gedung DPR, Senayan, Senin (27/1).

Hadir pula mendampingi Ketua DPR Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said dan Michael Wattimena, Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farihal dan Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan anggota Komisi X Popong Otje Djundjuna.

Karena itu, lanjut Ketua DPR, pada kesempatan ini pihaknya memanggil tiga kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenhub dan Menteri Ristek untuk membantu menyelesaikan masalah sertifikasi ini. Mengutip penjelasan dari Wakil dari Kemendikbud, Marzuki mengatakan, program sertifikasi lulusan SMK akan dilakukan pada tahun 2015, padahal pada tahun tersebut sudah memasuki pasar bebas.

“Kami mendesak program sertifikasi segera dilaksanakan mulai tahun 2014 ini. Kalau ada hambatan dana, bisa dilakukan revisi dalam APBN-Perubahan. Jangan menunggu tahun 2015 dimana orang-orang dari negara Asean sudah memenuhi ruang-ruang kerja bidang kedirgantaraan Indonesia, akhirnya tenaga kerja kita tersingkirkan,” tandasnya.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Karena itu pula, Ketua DPR berharap, anak-anak lulusan SMK itu langsung diakui bahwa mereka mempunyai kompetensi dalam bidangnya apakah *manufacturing* atau *maintenance*, dan bisa langsung bekerja di perusahaan penerbangan.

Pada umumnya Pimpinan Komisi V, VII dan X DPR mengapresiasi atas prestasi yang telah dicapai SMKN XII Bandung yang telah mampu merakit pesawat terbang Jabiru 1430. Mereka berharap, dari tenaga-tenaga terampil bidang kedirgantaraan ini akan mampu mengisi tenaga kerja bidang kedirgantaraan yang sekarang ini meningkat sangat pesat.

Di sisi lain, banyaknya tenaga terampil dari lulusan SMK adalah hikmah dari kebijakan pemerintah yang memperbanyak sekolah kejuruan. Mereka perlu segera dibantu dan dicari jalan keluarnya, sebab setelah lulus harapan mereka bisa segera bekerja. “Karena itu mereka jangan dihambat hanya karena ijazahnya belum disertifikasi sehingga tidak bisa masuk pasar kerja,” tegas Marzuki menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi I DPR Setuju Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Asnantio membahas tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di ruang rapat Komisi I DPR Senayan Jakarta, Senin (27/1) siang.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, seluruh Fraksi yang ada di Komisi I DPR pada prinsipnya telah menyetujui adanya ratifikasi Undang-Undang tersebut. Apalagi setelah mendengar paparan dari kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mengatakan dengan bom biasa saja daya musnahnya begitu besar apalagi kalau teroris menggunakan tenaga nuklir, hancurlah sebuah negara.

Ratifikasi, kata Hasanuddin sangat penting karena pada tanggal 14 September pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi internasional penanggulangan teroris nuklir, kemudian pada akhir tahun 2013 lalu oleh pemerintah diajukan kepada DPR untuk diratifikasi.

Dia mengemukakan bahwa teroris atau siapa saja tidak boleh menguasai nuklir dengan semena-mena apalagi untuk kegiatan teroris.

Sementara Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Asnantio mengatakan, bahwa tujuan meratifikasi konvensi ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme.

Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan terorisme nuklir baik di dalam



Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin berdialog dengan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Asnantio.

negeri maupun antar negara berdasarkan definisi yang diatur dalam konvensi ini.

Asnantio menambahkan, sesuai dengan konvensi ini negara mempunyai kewajiban menetapkan kepada setiap orang yang melakukan hal yang dilarang dalam konvensi ini sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya, selain itu dipandang perlu agar terorisme nuklir dapat dikriminalisasi sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing negara.

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir menekankan, Indonesia perlu bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan terorisme nuklir, tukar menukar informasi, melindungi kerahasiaan informasi terkait upaya memberantas kejahatan dimaksud. *(spy)/foto:iwan armanias/parle/andri**.

Korea Pandang Indonesia Sebagai Mitra Strategis

Indonesia merupakan mitra yang sangat strategis bagi Pemerintah Korea Selatan. Kerja sama investasi sudah mulai dibangun. Nilai perdagangan kedua negara diharapkan terus meningkat, seiring hubungan bilateral yang juga terus membaik.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Korea untuk Indonesia Kim Young Sun, Senin (27/1). Selama ini Korea sudah menjalin kerja sama investasi dengan PT. Krakatau Steel. Ini menjadi hal penting bagi kedua negara untuk hubungan yang

saling menguntungkan.

Dari kerja sama investasi itulah, menurut Dubes Korea, Indonesia menjadi mitra yang sangat strategis. Hanya saja, untuk kerja sama investasi, Pemerintah Korea masih mengeluhkan pembebasan lahan untuk membangun pabrik-pabrik baru di Indonesia. Seperti dituturkan Dubes Korea, pihaknya menginginkan pengurusan izin investasi satu atap untuk kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, nilai perdagangan kedua negara harus



Ketua DPR Marzuki Alie.

terus ditingkatkan. Hanya saja untuk hubungan kedua parlemen, perlu lebih ditingkatkan. Ini penting untuk diperbaiki ke depan agar semua masalah yang menyangkut kedua negara juga mudah diselesaikan lewat parlemen.

Kepada Ketua DPR, Dubes Korea

juga menyampaikan pemberitahuan bahwa Ketua Parlemennya akan berkunjung ke Indonesia pada 24 atau 25 Maret 2014. Pada tanggal ini, ungkap Marzuki, DPR sedang sibuk, karena menghadapi persiapan Pemilu 9 April mendatang. Apalagi pada 7 Maret-11 Mei 2014, DPR juga sedang reses panjang. Untuk itu, Dubes Korea segera menjadwalkan ulang kunjungan Ketua Parlemen Korea tersebut.

Menyinggung soal politik di Indonesia, Dubes Korea sangat memuji demokrasi Indonesia. Di tengah pluralisme,

keragaman, dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tetap bisa berhasil membangun demokrasinya dengan baik. "Saya sangat menghormati perkembangan demokrasi di Indonesia," kata Dubes Korea.

Sementara menurut Marzuki, perkembangan demokrasi di Korea juga sangat menarik. Korea sudah menggelar pemilihan presiden langsung sejak 1987. Kini, Presiden Korea malah seorang wanita. Partisipasi politik wanita Korea sangat tinggi. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR *Fit and Proper Test* 16 calon Anggota DEN

Komisi VII DPR akan melakukan *Fit and Proper Test* Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Direncanakan Komisi energi ini akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 16 orang calon anggota. "Kita akan langsung mengadakan *fit and proper test* pada siang ini, untuk kalangan akademisi, dan industri masing-masing empat orang," ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana di hadapan Ketua harian DEN Jero Wacik yang juga sebagai Menteri ESDM, di Gedung Nusantara I, Senin, (27/1).

Pada hari Selasa, 28 Januari, lanjut Sutan, Komisi VII DPR akan mengadakan test untuk 2 orang dari kalangan teknologi pada siang harinya. "Terak-

hir pada Senin 3 Februari pukul 10 WIB, direncanakan untuk kalangan konsumen sebanyak 4 orang, dan 2 orang dari lingkungan hidup," tandasnya.

Dia menambahkan, pemerintah telah mengusulkan 16 orang calon anggota DEN untuk dilakukan *fit and proper test*. "Mudah-mudahan kita mendapat orang terbaik untuk mengawal energi nasional," ujarnya.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, *fit and proper test* DEN dilakukan setiap lima tahun sekali. Sementara dari sekitar 100 orang calon mendaftar dan diseleksi oleh lembaga independen. "Kemudian masuk 23 nama yang memenuhi syarat dan final-



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

nya menjadi 16 orang," paparnya.

Menurutnya, 16 nama tersebut mewakili berbagai kalangan diantaranya kelompok akademisi, industri, konsumen dan kelompok teknologi, serta lingkungan. "Kita juga berharap *fit and proper test* ini dapat selesai," ujarnya. (si)/foto:hr/parle/odjie*.

Tim Pemantau UU PA DPR Berdialog dengan Muspida NAD



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berdialog dengan Gubernur NAD, dan Kapolda Aceh.

Tim Pemantau Pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) DPR RI berkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penerapan undang-undang yang sudah berlangsung sejak tahun 2006. Ketua Tim Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR RI mengatakan dalam dialog dengan jajaran muspida dilakukan evaluasi sejumlah persoalan yang menghambat kemajuan.

"Kita mencatat sejumlah keberhasilan telah kita buat di Provinsi Aceh ini dengan dana otonomi khusus sejak 2008 yang mencapai Rp.26,9 triliun.

Ada sejumlah permasalahan mari kita dalam bersama dan mencari solusi terbaik. Sesuai UU PA dana otsus difokuskan untuk pembangunan dan pemeliharaan sektor yang menjadi prioritas yaitu infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan,” katanya dalam pertemuan di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Kamis (23/1/14).

Terkait laporan masih belum tuntasnya sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sesuai amanat UU PA, ia menyatakan akan membicarakannya dengan pemerintah. “Dari 9 PP, 4 sudah selesai sedangkan 5 lainnya belum selesai. Pak Gubernur selalu meminta kita memberi perhatian terutama RPP tentang Pengelolaan Migas. Saya setuju Tim Pemantau UU PA perlu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah,” tambahnya.

PP lain yang masih menjadi utang pemerintah pusat diantaranya PP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, PP tentang Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh. Sedangkan Perpres yang belum ditetapkan yaitu tentang

Penyerahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah.

Pada bagian lain Priyo juga memberikan apresiasi atas upaya *cooling down* dari segenap pihak terkait perbedaan soal Qanun tentang Bendera Aceh. Ia kemudian mengusulkan agar jajaran muspida mencari alternatif lain yang dapat diterima seluruh pihak. “Alternatif yang pernah saya usulkan yang pernah saya diskusikan panjang dengan Pak Gubernur Doktor Zaini, tokoh DPR Aceh ialah bendera yang melambangkan kejayaan zaman Kesultanan Aceh dulu misalnya, dimodifikasi sedemikian rupa. Itu akan menunjukkan cita rasa bagi yang lain sehingga memunculkan kebersamaan. Itu akan jadi jalan keluar yang sangat baik,” paparnya.

Terkait wacana untuk melengkapi Wali Nanggroe dengan majelis pendukung sebagaimana yang dimiliki pemerintah politisi FPG ini menilai tidak perlu. Sebagai pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU PA ia menyebut Wali Nanggroe adalah simbolik yang diagungkan dalam konteks kulutural, penghormatan terhadap

nilai asli Aceh. “Kalau kemudian Wali Nanggroe bergulat dengan hal eksekutif dikhawatirkan akan tumpang tindih dan mengundang gesekan yang tidak diinginkan,” ujar dia.

Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah memaparkan proses pembahasan 49 Qanun sesuai amanat UU PA berjalan lancar dan saat ini sudah selesai 70 persen lebih. Ia menargetkan 12 yang tersisa akan tuntas pada tahun ini. “Dari data itu terlihat upaya penuntasan amanat UU PA oleh Pemerintahan Aceh berjalan cukup lancar, yang menjadi masalah sekarang di tingkat pusat. Kami bahagia bisa menyampaikan hal ini kepada pemantau dari DPR RI. Kami berharap DPR dapat mendorong pemerintah pusat segera tuntaskan masalah ini,” jelasnya.

Gubernur dalam pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat diantaranya Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Kapolda Irjen Pol. Herman Effendi dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo. Sedangkan Tim Pemantau UU PA DPR beranggotakan 15 orang termasuk 4 orang Wakil Ketua Tim yaitu Marzuki Daud (FPG), Nova Iriansyah (FPD), Nasir Djamil (FPKS) dan Manuel Kaisiepo (FPDIP). (iky)

Kemenag Lamban Susun PP Atau Permen PTAI

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kasma Bouty menilai Kementerian Agama lamban dalam membuat Peraturan Pemerintah atau Permen tentang Perguruan Tinggi. Padahal Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi telah disahkan pada tahun 2012 lalu. Hal itu membuat segala ketentuan yang ada di Undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan.

Hal tersebut diungkapkan Kasma Bouty usai Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Agama Islam Komisi VIII DPR RI dengan Forum Rektor yang terdiri dari Rektor UIN Sunan Gunung Djati, IAIN Sumatera Utara, IAIN Mataram, dan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Kamis (23/1) siang.

“Sudah sejak lama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendesak Kemenag untuk segera membuat PP atau Permen perguruan tinggi sebagai turunan dari UU No.12 Tahun 2012 tapi hal itu belum dilak-



Anggota Komisi VIII DPR Kasma Bouty.

sanakan. Sementara dari Kemendiknas telah membuat PP tentang Perguruan Tinggi,” jelasnya.

Kasma mengatakan bahwa sejak lama pengelolaan PTAI sangat karut marut. Dari 20 persen APBN yang diperuntukkan bagi dunia pendidikan, PTAI seluruh Indonesia hanya mendapat 5 Triliun.

“Itu sangat minim menurut saya. Sementara perguruan tinggi di bawah Kemendiknas sangat besar,” jelas Kasma.

Kasma menduga hal tersebut bisa disebabkan karena belum turunnya PP dari Kemenag tentang Perguruan Tinggi. Sementara Kemendiknas telah membuat PP atau Permenya. Oleh karena itu, Kasma meminta agar Kemenag segera membuat PP atau Permen tentang Perguruan tinggi yang menjadi turunan dari UU No.12 Tahun 2012, sehingga karut marut atau permasalahan dalam perguruan tinggi Agama

Islam di Indonesia bisa diminimalisir.

Bahkan lebih lanjut Kasma meminta agar Kemenag meningkatkan anggaran untuk PTAI semata-mata untuk peningkatan kualitas lulusan dari PTAI itu sendiri, yaitu menciptakan manusia cerdas dan berakhlak.

Apa yang diungkapkan Kasma tersebut menjadi jawaban atas aduan atau laporan dari Forum Rektor PTAI yang merasakan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah, seperti anggaran dan sarana serta prasarana yang terbatas. Sementara di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan PTAI semakin tinggi. (Ayu), foto : hr/parle/andry*

Komisi VIII Tinjau Penanganan Pengungsi Korban Banjir DKI Jakarta

Komisi VIII DPR RI menilai penanganan tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Ade Barkah saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi pengungsian korban banjir di beberapa titik pengungsian di Ibukota, Jumat (24/1).

“Penanganan tanggap darurat oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI Jakarta yang merupakan binaan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari proses evakuasi yang sangat sigap, dapur umum yang bersih serta penanganan korban banjir di pengungsian juga sudah cukup baik,” jelas Politisi dari F-PKS ini.

Selain itu, tambah dia, dalam hal administratif BNPB juga sudah cukup baik. Data-data korban para pengungsi di setiap wilayah terdata dengan sangat baik. Dengan demikian memudahkan orang untuk mencari sanak saudara yang menjadi korban banjir.

Meski demikian Ade berharap agar BNPB melakukan penambahan tenaga



Tim Komisi VIII DPR meninjau korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

ahli, meski saat ini di lokasi pengungsian juga sudah ada tenaga bantuan dari Pramuka. Selain itu ia berharap agar proses kaderisasi tenaga ahli dari BNPB terus berlangsung. Hal ini mengingat bencana banjir yang tidak dapat diprediksi lagi kapan datangnya. Jika sebelumnya ada siklus lima tahunan, namun belakangan ini hampir setiap tahun ibukota dan beberapa kota di

Indonesia terkena banjir.

“Selain itu kami juga mendorong BNPB untuk meningkatkan anggaran tanggap darurat. Jangan sampai minimnya dana menjadi kendala dalam pelaksanaan evakuasi dan penanganan korban banjir,” ujar Ade mengakhiri. (Ayu) foto: andrie/parle/ry.

DPR Terus Kawal Aceh Bangkit dari Ketertinggalan

Wakil Ketua Tim Pemantau UU Pemerintahan Aceh (PA) DPR Marzuki Daud mengatakan Pemerintah Provinsi Aceh harus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan. Data Bappenas menunjukkan provinsi paling barat Indonesia ini masih berada pada nomor 16 termiskin dari 34 provinsi.

“Masih banyak daerah yang masuk kategori tertinggal di Aceh seperti di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh

Selatan, Kabupaten Bireuen. Aceh itu masih nomor 16 termiskin dari 34 Provinsi, ini data Bappenas. Kita di DPR akan terus mendukung, mengawal upaya kebangkitan ini,” katanya usai mengikuti rapat dengan jajaran Muspida Aceh di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Kamis (23/1/14).

Ia menambahkan salah satu agenda penting yang dikawal DPR adalah amanat UU PA yang menyatakan Provinsi Aceh



Suasana pertemuan Tim Pemantau Aceh DPR dengan Gubernur NAD.

akan memperoleh dana otonomi khusus (otsus) selama 20 tahun. Ini berarti akan berakhir sampai tahun 2027. Secara kumulatif sejak tahun 2008-2013 dana otsus yang telah diserahkan pemerintah pusat adalah Rp.26,9 triliun.

Upaya lain yang juga didukung DPR adalah membangkitkan kembali potensi sumber daya minyak dan gas bumi di provinsi yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah

ini. “DPR mendorong pemerintah membangun terminal gas Arun untuk menyuplai Sumatera dengan investasi 4,2 triliun. Usulan ini telah disetujui Presiden, sangat ideal karena Arun ini pernah jaya, lahannya luas, punya pelabuhan, tenaga kerja terampil,” paparnya.

Politisi FPG ini menekankan Kawasan Arun sebenarnya layak untuk dibangun *refinery* atau pabrik kilang minyak yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. “Kalau kilang minyak dibangun disana impor BBM bisa dikurangi. Jadi minyak mentah kita bisa diolah di Arun menjadi BBM agar menjadi lebih murah dan efisien. Mengapa kita mengimpor BBM dari luar? Jadi kita minta pemerintah juga mewujudkan ini,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pemantau UU PA, Priyo Budi Santoso mengingatkan kembali perjuangan meyakinkan pemerintah agar membangun Terminal Gas di Arun. “Ini murni perjuangan Tim Pemantau Otsus Aceh. Kita tidak ingin kalau Arun yang dulu pernah hebat, kemudian jadi sisa-sisa dan besi tua, malu kita. Jadi kita minta Dirut PT Arun dan Direksi Pertamina bekerja sebaik-baiknya menjadikan kawasan ini kembali menjadi pusat pertumbuhan baru,” pungkask dia. *(iky)*

DPR Harus Punya Channel TV Sendiri

Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan dengan dilaunchingnya kerja sama dengan Berita Satu, First Media dan Big TV maka TV Parlemen harus bekerja lebih keras. “Ini tantangan yang luar biasa. TV Parlemen harus lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai media yang dipercaya oleh Pimpinan DPR menyampaikan informasi kepada publik,” ujar Marzuki Alie menjawab pers usai meresmikan kerja sama TV Parlemen dengan ketiga stasiun TV tersebut, Selasa (28/1) di loby Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Menurut Ketua DPR, tuntutan kepada TV Parlemen bekerja lebih profesional adalah bagaimana mengemas berita secara adil. Setiap Komisi dibuat slotnya secara adil, kemudian kepada Pimpinan DPR juga dibuatkan slotnya, para Pimpinan mempunyai ruang yang sama untuk berbicara di forum tv.

“Ini adalah proses belajar bagi TV Parlemen. Harapan saya, TV Parlemen harus punya channel sendiri sebagai



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

TV publik yang bertanggungjawab untuk mempublikasikan kerja Dewan kepada masyarakat,” ungkap Marzuki.

Jangan sampai ada anggapan, DPR tidak boleh punya tv, itu keliru. “DPR

harus boleh punya TV. Tinggal bagaimana bentuk kepemilikannya, apakah Kesekjenan atau yang lain. DPR harus punya tv, kalau tidak akan ketinggalan,” kata politisi Partai Demokrat ini menegaskan. *(mp), foto : hr/parle/naefurodji**

DPR Beri Bantuan Korban Banjir Rawajati

Para anggota DPR dari Rukun Warga Khusus Rumah Jabatan Anggota Komplek Kalibata dan Ulujami dikoordinir oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR Rabu (29/1) menyerahkan bantuan kepada korban banjir di wilayah Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Bantuan yang dihimpun dari para anggota Dewan ini berupa sembako dan uang tunai.

“Sumbangan ini jangan dilihat nilainya, tetapi sebagai kepedulian para anggota Dewan untuk membantu meringankan beban korban banjir. Mudah-mudahan bingkisan ini membawa manfaat dan berkah dan diharapkan banjir kali ini merupakan yang terakhir,” kata Wakil Ketua BURT Adjeng Ratna Suminar ketika menyerahkan sumbangan kepada Hastuti, isteri RW 03 yang aktif membantu korban banjir di lokasi tersebut.

Korban banjir di RW 3 termasuk parah dimana sebanyak 1.200 orang atau 340 KK mengungsi. Sedangkan di RW 01 korban banjir menempa 66 rumah terdiri 99 KK dan sekitar 300 jiwa mengungsi. Penanganan korban banjir terlihat cukup baik, dengan adanya posko dan petugas membagikan sembako serta dapur umum yang dikordinir oleh ibu-ibu PKK.

Para anggota yang mengunjungi korban banjir tersebut adalah Wakil Ketua BURT Nur Iswanto dan Adjeng Ratna Suminar, Abdul Wahid, Refrizal, Tengku Irwan, Oelfah S. Hatmanto dan Arwani Tomafi.

Kepada pers, Refrizal mengharapkan pemerintah DKI Jakarta untuk segera berbuat menanggulangi banjir. Program-program yang dicanangkan segera direalisasikan seperti melakukan normalisasi sungai Ciliwung, ide rumah susun dan rumah deret apalagi dana yang dialokasikan triliunan rupiah.



BURT DPR mengunjungi korban banjir di Rawajati, Jakarta Selatan.

Selain itu proyek banjir kanal dibikin yang luas dan dikeruk sedalam-dalamnya, kemudian di kiri dan kanan dibikin bantaran yang tinggi, sehingga kalau banjir tidak melimpah lagi. Ia mempertanyakan anggaran di DKI berapa triliun yang telah dipakai mengatasi banjir.

Ketika didesak terobosan apa yang perlu dilakukan Gubernur DKI, dengan tegas Refrizal mengatakan “Segera dilaksanakan. Pemerintah kita minta tegas termasuk Pemda DKI sebab anggarannya sudah tersedia. Mana yang perlu dibantu pusat, DPR akan mendorongnya,” tegasnya.

Kalau mau membangun seperti apartemen bisa selesai dalam setahun. Jadi kata Refrizal, tidak direlokasi, tetapi tanahnya dibantaran ditinggikan dan

kemudian dibangun rumah deret atau rumah susun sewa (rusunawa).

Karena itu dia mendesak pemerintah, segera bertindak menanggulangi banjir yang rutin terjadi ini. Wakil Ketua BURT Adjeng Ratna Suminar menyampaikan hal senada, DPR akan terus mendorong agar masalah banjir segera dituntaskan.

Untuk mengatasi banjir di Jakarta, menurut Suminar harus dilakukan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Harus ada kerja sama antar pemda terutama wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Di sisi lain masyarakat juga diharapkan peran sertanya ikut menanggulangi banjir di Jakarta seperti tidak menggunduli hutan, tidak tinggal di bantaran sungai dan tidak membuang sampah di sungai. (mp), foto : hr/parle/andri*



Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ahmad Fachrial Rapat Kerja dengan Kemen LH, Kemenlu, dan Kemenkumham terkait RUU Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, Rabu (29/1) Foto: HR/Parle/odjie*.



Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno didampingi Abdul Hakim saat RDPU dengan Imparsial dan Kontras membahas revisi Undang-undang tentang Kepolisian, Rabu (29/1) Foto: HR/Parle/odjie*.



Wakil Ketua BURT DPR RI Nur Iswanto dan R. Adjeng Ratna Suminar didampingi sejumlah anggota BURT memberikan bantuan korban banjir di Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (29/1) Foto: HR/Parle/andri*.